

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Adrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika
- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- H Zulkarnaen, Dwi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Pustaka Setia, 2018
- Kartini Muljadi and Dkk, *Hak-Hak Atas Tanah*, 8th ed. Jakarta: Prenada Media, 2016
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Paulus Efendie Lotulung, *Hukum Tata Usah Negara Dan Kekuasaan*, Jakarta, Salemba Humanika, 2013
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-XXI, Rajawali Pers, Depok.
- Urip Santoso, 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN).

### C. Sumber Lain

- Bernadetha Aurelia Oktavira, Prosedur dan Syarat Pemecahan Tanah Induk, *Hukum Online*, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-dan-syarat-pemecahan-tanah-induk-lt51226b6d8ef8d/>
- Budi Suhariyanto, 2019, Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Konstitusi*, Vol 16 No 1
- Budi Aspani, 2012, Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol 16 No 3
- Boedi Harsono (b), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Tugas dan Fungsi Pokok, <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- Mira Novana Ardani, 2019, Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 6 No 3
- Mohammad Afifudin Soleh, 2018, Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rahmi Murnirati, Sucy Delyarahmi, 2023, Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal dan Akibatnya di Sumatera Barat, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol 7 No 2
- Ratnawati, Dwi heny, "Pelaksanaan Akta Pelepasan Hak Sebagai Alas Hak Untuk Mengajukan Permohonan Peralihan dan Hak Guna Bangunan yang Jangka Waktunya Telah Berakhir". *Jurnal Akta*, Vol. 5 No.1 Maret 2018
- Rauf A. Hatu, "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian", dalam *Jurnal Prasetya Online*
- Rifai Hadi, "4 Jenis Putusan Akhir PTUN", dalam Artikel *Rifaihadi.com*

Rizky Pratama, 2023, Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol 2 No 1

Willa Wahyuni, Aturan Batas Maksimal Kepemilikan Tanah di Indonesia, Hukum Online, Januari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-batas-maksimal-kepemilikan-tanah-di-indonesia-lt659d5734514e3/>